

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil disuatu Negara namun memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai cita-cita suatu bangsa dan Negara. Bahkan apabila ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat dari kemajuan sebuah Desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi awal dari sebuah Desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapannya pemerintah Desa dapat membangun perekonomian masyarakat Desa menuju desa yang mandiri.

Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara lebih serius serta didiskusikan lebih mendalam. Pasalnya sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, kebijakan utama yang dibawa adalah diberikannya alokasi dana Desa diperkirakan berkisar Rp 800 Juta Rp1,4 miliar per Desa, diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke Desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu cara untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa adalah melalui pertumbuhan lembaga mikro Desa, dan salah satu

lembaga mikro diwilayah pedesaan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Permendesa Nomor 4 tahun 2015, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun tujuan BUMDes seperti yang dinyatakan dalam Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dan adari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keuanggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di Desa tersebut.

Pendirian BUMDes oleh karenanya harus berorientasi pada kepemilikan bersama (Pemerintah Desa dan masyarakat) yang tidak hanya memberikan manfaat finansial (seperti ; pajak dan pendapatan asli desa) tetapi juga manfaat ekonomi yang luas (seperti; lapangan kerja, ekonomi berkelanjutan, dan sebagainya). Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan program pemerintah harus diupayakan dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat desa itu sendiri.

Sehubung dengan pentingnya partisipasi dan prakarsa masyarakat,

Solekhan (2014:73) dalam penelitiannya di Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu merekomendasikan perlunya konsep pengelolaan BUMDes yang baik meliputi: (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat ; (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku; (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan ; (4) pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah harus lebih memperhatikan kepala desa sebagai titik sentral dari pembangunan nasional sebagai upaya untuk memperbaiki kemiskinan yang ada di Indonesia. Namun upaya dari ekonomi desa belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang telah diharapkan.

Terkait dengan masalah pengelolaan BUMDes banyak sekali tantangan, penelitian BUMDes di Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh Aggunggunanto *et al.* (2016), mendapatkan kesimpulan bahwa banyak desa gagal dalam mengelola BUMDes. Hal itu disebabkan karena kurang siapnya desa dan potensi desa yang sangat minim. Permasalahan BUMDes di Jepara yakni keterbatasan modal dalam pengembangan usaha, minat masyarakat untuk meminjam sangat tinggi akan tetapi tidak diimbangi dengan modal yang tersedia akhirnya usaha simpan pinjam menjadi stagnan saja tidak ada perkembangan, selanjutnya keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola BUMDes masih lemah dikarenakan tingkat pendidikan yang masih sangat minim dan masih banyak pengurus BUMDes yang merangkap

jabatan sehingga pengurus lebih fokus pada yang utama.

Beberapa fenomena yang terkait dengan BUMDes, menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Sandjojo mengatakan desa kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDes). "Saat ini, baru ada 6.000 BUMDes yang jalan, karena desa kekurangan sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes tersebut," ujar Mendes seperti dikutip Antara, kemarin. Kemendes pada 2016, katanya, telah memberikan pelatihan kepada 1.000 pendamping desa, namun dikarenakan jumlah desa yang mencapai 74.910 desa, maka permasalahan SDM di desa itu baru terselesaikan 30 tahun kemudian. SDM sangat yang berkompeten sangat penting bagi kelangsungan BUMDes. Motivasi merupakan bagian yang penting dalam mendirikan dan menjalankan BUMDes. Menurut Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eko Ariantori, menyebut pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala beberapa masalah. Salah satunya, masih banyak masyarakat desa yang tidak memiliki pengetahuan akan pentingnya BUMDes. "Pertama tipe ketidaktahuan. Kedua kepala desa yang tahu, ada inisiatif mendirikan BUMDes, tapi tidak merasa ada untungnya. Ketiga, ada yang tahu, tapi mendirikan itu asal saja. Akhirnya kita pelan-pelan membangun mimpi mereka, kenapa mau mendirikan," jelas dia, Jumat (6/4/2018) liputan6.com.

Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki wilayah administrasi meliputi 32 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 266 Desa. Dari banyaknya desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, baru ada 95 desa yang telah memiliki

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah dikelola dan dijalankan. Salah satu desa yang telah memiliki BUMDes yaitu Desa Enonapi.

Tabel 1.1

Modal Awal BUMDes di Desa Enonapi

Tahun	Modal Awal (Rp)	Hasil (Rp)	Keuntungan/Rugi (Rp)
2018	70.000.000	100.000.000	30.000.000
2019	85.000.000	110.000.000	26.000.000
2020	110.000.000	104.425.000	-5.575.000

Sumber Data : BUMDes Desa Enonapi, 2021

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Desa Enonapi mengalami penurunan. BUMDes ini memiliki beberapa jenis kegiatan usaha, seperti: usaha simpan pinjam, usaha perantara (penjualan pupuk, pakan ternak) dan unit perdagangan (penjualan hasil bumi).

Modal awal pada tahun 2018 adalah sebesar Rp70.000.000 dengan hasil pengelolaan sebesar Rp100.000.000 dan memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000.000. Sedangkan pada tahun 2019 modal awal sebesar Rp85.000.000 dikelola dan memperoleh hasil Rp111.000.000 dan memperoleh keuntungan sebesar Rp26.000.000 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 modal awal Rp110.000.000, dengan hasil pengelolaan sebesar Rp104.425.000 dan tidak memperoleh keuntungan malah menyebabkan kerugian sebesar Rp5.575.000. Hal ini diperkirakan oleh beberapa faktor seperti cuaca, harga pasar yang kurang menentu dan pandemi covid -19 yang saat ini terjadi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2018-2020 (Studi Kasus Pada Desa Enonapi Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Enonapi Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Enonapi Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Enonapi Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Enonapi Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa Enonapi

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan, masukan dan referensi yang bermanfaat bagi pemerintah Desa Enonapi dalam pengelolaan

keuangan BUMDes.

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengelolaan keuangan BUMDes.

3. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambah referensi dan bahan acuan bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.